

ABSTRAK

ZONNY BUDI SUTRISNO. NIM. E. 1811054. Optimalisasi Tugas Operasional Daerah Oleh Satuan Brimob Kedung Halang Di Papua Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. 2023.

Tugas pokok, fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintensitas tinggi seperti kejahatan *insurgensi* merupakan sebuah keharusan manakala satuan-satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakan hukum, pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan. Dengan adanya perkembangan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi selama ini, menjadikan peran dan tugas Korps Brimob sangat dibutuhkan guna mendukung upaya penegakan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun *stake holder* dan *share holder* lainnya, menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi pelaksanaan tugas operasional Satuan Brimob Kedung Halang dalam pelaksanaan tugas operasional daerah Papua berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi oleh Satuan Brimob Kedung Halang dalam pelaksanaan tugas operasional daerah Papua berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa optimalisasi satuan brimob kedung halang dalam pelaksanaan tugas operasional daerah Papua berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2009 yaitu menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan yang diambil oleh Korps Brimob dianggap adil oleh masyarakat apabila mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif serta mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Kata Kunci : Optimalisasi, HAM, dan Tugas Polri

ABSTRACT

ZONNY BUDI SUTRISNO. NIM. E. 1811054. *Optimization of Regional Operational Tasks by the Kedung Halang Brimob Unit in Papua Based on Perkap Number 8 of 2009 Concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Police Duties*. Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda Bogor University. 2023.

The main task, function and role of the Police Mobile Brigade Corps in efforts to deal with high-intensity crimes such as crime of insurgency is a necessity when other police units are unable to carry out the duties of law enforcement, restoring security and maintaining security. With the development of high-intensity security disturbances that have occurred so far, the role and duties of the Brimob Corps are urgently needed to support law enforcement efforts in a police synergistic manner with the internal Police and TNI as well as other stake holders and share holders, tackling high-intensity security disturbances which are increasingly taking the form of phenomena of the development of acts of terrorism and separatism in order to create a conducive Kamtibmas. The objectives of this research are: 1) To find out and analyze the optimization of the implementation of the operational tasks of the Kedung Halang Mobile Brigade Unit in carrying out operational tasks in the Papua area based on Perkap Number 8 of 2009 and 2) To know and analyze the obstacles faced by the Kedung Halang Brimob Unit in carrying out operational tasks in the Papua area based on Perkap Number 8 of 2009. Starting from the problem, the research method used is a normative juridical research method, namely law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogmas. The results of the study revealed that the optimization of the Kedung Halang Mobile Brigade unit in carrying out operational tasks in the Papua area was based on Perkap No. 8 of 2009, namely to show the public that all actions in the framework of law enforcement must be perceived as an enforcement of justice for the community. A decision taken by the Brimob Corps is considered fair by the community if the horizontal control mechanism is effective and realizes domestic security which includes maintaining security and public order, order and law enforcement, providing protection, protection and service to the community, and fostering public tranquility by uphold human rights

Keywords: Optimization, Human Rights, and Police Duties